



News Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 04/NL/04/2015

April 2015

**Pemerintah Perluas Lahan Pertanian
Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani**

**9 Langkah Utama Kementan
Menuju Pencapaian Swasembada Pangan**

**2 Program Baru Kementan Untuk
Capai Target Swasembada Pangan**



Pemerintah Minta Agar Produk Pertanian Berorientasi Ekspor	03
9 Langkah Utama Kementan Menuju Pencapaian Swasembada Pangan	04
Kementan Siapkan Anggaran Rp. 368,5 M Untuk Program Revitalisasi Penggilingan Padi	05
Maksimalkan Produk Pertanian Kementan Akan Canangkan Program Pemuda Tani	07
Kementan Mengajak Dekan dan Mahasiswa Membantu Pemerintah Capai Swasembada	08
Jalankan UPSUS Swasembada Pangan Kementan Canangkan IP 200 dan 300	10
Pertanian Sulsel Mendapat Perhatian Khusus dari Kementan	11
Kementan Maksimalkan Pemanfaatan Potensi Pertanian Tabanan	13
Bukti Mampu Swasembada Daging Pemkab Bone Gelar Expo dan Kontes Ternak	14
Mentan Ingatkan Provinsi Maluku Pentingnya Ketahanan Pangan	15
Pulau Buru Miliki Potensi Pengembangan Ternak Sapi	17
Presiden Tetapkan HPP Jagung Mentan siap Laksanakan	18

Pengarah
Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marhot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom
Kurniawatisari, S.Sos

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian



Pemerintah Minta Agar Produk Pertanian Berorientasi Ekspor

"Pemerintah telah mempersiapkan perluasan lahan yang sangat besar yang akan diberikan kepada petani, terutama di luar Jawa. Luasan lahan yang akan dibagikan kepada rakyat mencapai 9 juta hektare. Rencana perluasan lahan pertanian dan perkebunan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani"

Pemerintah ingin dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi para petani baik yang bergerak di usaha perkebunan maupun pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI akan menekankan peningkatan komoditas ekspor di sektor pertanian dan perkebunan serta mengembangkan industri manufaktur. Hal itu perlu tersebut dilakukan agar produk-produk pertanian bisa diekspor. Tidak hanya diproduksi untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri saja.

"Saya minta agar produk-produk yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan berorientasi ekspor lebih ditingkatkan. Agar saat dipasarkan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, saya minta bahan mentah dari perkebunan dan pertanian dapat diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi dan barang jadi" kata Presiden, Joko Widodo saat usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta (8/4).

Rapat Terbatas dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Keuangan. Sementara, perusahaan yang hadir yaitu para direktur utama dari PT Unggul Widya Group, PT Sulung Ranch, PT Makin Group, PT Menteng Kencana Mas, PT Sungai Budi Group.

Dalam rapat tersebut, Presiden menuturkan pentingnya implementasi konsep inti plasma untuk mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan yang berorientasi ekspor. Masukan dari pengusaha yang hadir diharapkan dapat mendorong produktivitas dan kualitas produk-produk pertanian dan perkebunan Indonesia yang berorientasi ekspor. Untuk itu kepada seluruh

pemangku kepentingan agar selalu meningkatkan kualitas dan promosi jenis-jenis produk ke negara lain.

"Saya ingin mendapatkan masukan terutama dari pengusaha yang hadir, mengingat peran pengusaha juga penting agar program menyejahterakan petani ini bisa berhasil. Khususnya, pandangan dan masukannya mengenai produk-produk mana saja yang berorientasi ekspor dan strateginya. Sedangkan implementasi konsep inti dan plasma sangat penting, agar komoditas yang ada ini orientasinya diarahkan kepada ekspor" tutur Presiden.

Untuk merealisasikan kegiatan itu, Presiden mengatakan pemerintah berencana memperluas lahan pertanian dan perkebunan. Rencana perluasan lahan pertanian dan perkebunan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Perluasan lahan yang akan diberikan kepada petani, terutama di luar Jawa mencapai 9 juta hektare.

Untuk meningkatkan kualitas dan produksi hasil pertanian, pemerintah merencanakan pembuatan kawasan pertanian di Indonesia Timur, tepatnya di Papua. Dalam kawasan pertanian tersebut nanti akan disertai dengan adanya pabrik-pabrik pengolahan di sekitar kawasan. Hal itu selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar juga akan menyumbang pertumbuhan ekonomi kawasan Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan berdasarkan evaluasi hasil kerja selama Oktober 2014 sampai Maret 2015, ada penambahan lahan tanam seluas 700 ribu hektare, yang diharapkan bisa meningkatkan produksi hingga 3 juta ton. Untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat, pemerintah juga telah menyiapkan jutaan hektar lahan untuk membangun food estate dan program hilirisasi.

"Setelah dievaluasi hasil kinerja kami selama Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015, ternyata ada kenaikan penambahan luas tanam 700 hektare dan diperkirakan bisa berproduksi mencapai tiga juta ton. Rencana ke depan ada pembukaan lahan baru di daerah perbatasan seluas satu juta hektare untuk sawit, kemudian di Kalimantan Barat seluas 500.000 hektare untuk food state, dan untuk hilirisasi seluas 3 juta hektar yang akan dilakukan tahun ini." kata Mentan.

Mentan memaparkan fokus pelaksanaan program food estate ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Namun yang di Merauke, Papua, juga akan tetap dijalankan. Khusus Kalimantan, untuk sementara ada alokasi lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 350 ribu hektar. Rencananya tanaman pangan yang



akan dikembangkan di food estate meliputi jagung dan kedelai.

Terkait padi, Mentan menerangkan produksi beras bisa tinggi, sehingga target perubahan pengadaan beras dari 2,7 juta ton menjadi 4 juta ton oleh Perum Bulog bisa tercapai, karena pada tahun 2015 ada tambahan musim tanam pada Oktober-Maret, sehingga pada tahun yang samadiperkirakan luas areal tanam padi meningkat dari 8,1 juta hektar menjadi 8,7-8,8 juta hektar.

"Dengan adanya perluasan areal tanam

yang meningkat ditambah bantuan alat mesin pertanian (alsintan) ke petani maka akan mendorong peningkatan produksi padi tahun ini. Saat ini sudah ada pendistribusian alsintan sebanyak 30.000 unit termasuk traktor. Saya kira nanti aset sebanyak 30.000 ini sudah bisa diterima masyarakat antara April-September 2015," terang Mentan.

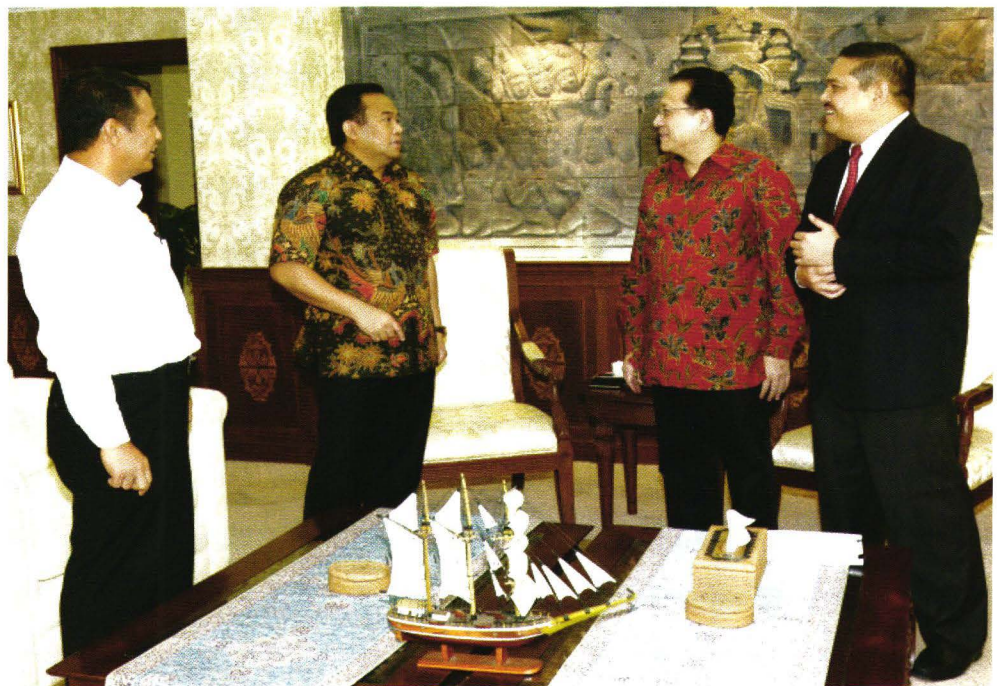
Mentan mengaku optimistis dengan adanya perbaikan di sisi lahan dan bantuan alsintan, termasuk bibit, pupuk, dan irigasi yang baik, maka produksi padi/beras tahun ini akan meningkat cukup signifikan.

Meningkat sebesar antara 5% sampai 10%, Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui realisasi berbagai program itu akan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kalau ini direalisasikan, termasuk pembangunan *food estate* maka kesejahteraan petani akan meningkat, Kementan telah membentuk tim khusus serta upaya khusus terkait adanya penambahan 700 ratus ribu hektar tahun ini" ujar Mentan.

9 Langkah Utama Kementan Menuju Percepatan Swasembada Pangan

"Program kerja Kementan 2015 adalah mencapai target swasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Dalam mengejar target tersebut, Kementan sudah melakukan 9 langkah utama untuk melakukan Upaya Khusus percepatan swasembada dan peningkatan produksi. Dari 9 Upaya Khusus tersebut, Kementan sudah merealisasikan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tersier, tersedianya benih unggul bersertifikat, pengadaan dan distribusi pupuk serta memperkuat penyuluh di 514 kabupaten/kota"



Didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan para pejabat Eselon I, Menteri Pertanian Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membahas rencana kerja Kementerian Pertanian pada tahun 2015 dan evaluasi capaian pelaksanaan program kerja Kementerian Pertanian pada tahun 2014 terutama yang terkait dengan pencapaian swasembada pangan yang dicanangkan Pemerintah.



"Dengan mendapat pagu anggaran sebesar Rp 32,18 triliun, target kementerian Pertanian pada tahun 2015 adalah tercapainya swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun. Oleh karena itu sekarang kami tengah bekerja keras untuk melakukan

tugas membenahi sektor pertanian.

"Saya yakin Indonesia akan capai swasembada pangan antara lain padi, jagung, kedelai dalam 3 tahun dan target produksi gabah kering giling (GKG) 73,40 juta ton di 2015" ujar Menteri Pertanian, Amran

Sulaiman saat Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPD RI (15/4).

Dalam rapat tersebut Mentan memaparkan dalam mengejar target swasembada pangan, Kementan sudah melakukan 9 langkah utama untuk melakukan Upaya Khusus percepatan swasembada dan peningkatan produksi, yaitu Penyederhanaan proses lelang bibit dan pupuk menjadi Penunjukan Langsung melalui Perpres Nomor 172/2014 dan Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa; Penyelesaian Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mentan, Menteri PU dan PERA, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP; Pelaksanaan Kegiatan

refocusing 2015; Penyelesaian DIPA APBN-P 2015 yang telah terbit awal Maret 2015; Penandatanganan MoU dengan TNI AD; Penandatanganan MoU dengan Universitas; Membangun Komitmen dengan Pemerintah Daerah; Mendorong penerbitan HPP (Harga Patokan Pemerintah) gabah/beras; Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

"Dari sembilan upaya khusus tersebut, saat ini Kementan sudah merealisasikan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tersier mencapai 808.790 hektar dari target 1,5 juta hektar. Jaringan irigasi kita itu totalnya 1,5 juta hektar, sebagian besar rusak. Sekarang anggaran perbaikan sudah terealisasi 53,92% atau sudah terealisasi untuk perbaikan 808.790 hektar. Saat ini juga sudah tersedia benih unggul bersertifikat sebanyak 77.000 ton yang sebagian masih dalam proses pengadaan dan distribusi ke petani. Sudah terealisasi pengadaan dan distribusi pupuk sebanyak 1,69 juta ton dan memperkuat penyuluh dengan melibatkan mahasiswa/dosen, Babinsa, penyuluh swadaya, dan lainnya di 514 kabupaten/kota," papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa sekarang sedang mengupayakan mendapat tambahan areal lahan tanam sebesar 700.000 hektar sawah dan peningkatan produksi padi 4 juta ton. Untuk mengejar target tersebut berbagai cara dilakukan, termasuk menggandeng TNI untuk penyediaan tenaga penyuluh.

"Kita perlu menggandeng TNI untuk sebagai tenaga penyuluh para petani karena penyuluh pertanian lapangan yang ada umurnya 50 tahun ke atas. Jadi 27.000 penyuluh di Indonesia umurnya tua-tua. Kalau penyuluhnya umur masih sekitar 40-an tahun maka semangatnya jelas beda dengan penyuluh yang 60 tahun," terang Mentan.

Mentan juga menjelaskan selain membantu tenaga penyuluh pertanian, Kementan akan membagikan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam 3 bulan secara gratis kepada gabungan kelompok petani pada tahun 2015, yakni Traktor R2 sebanyak 26.100 unit; Traktor R4 sebanyak 1.500 unit; Pompa air sebanyak 9.178 unit; *Rice transplanter* (mesin penanam) sebanyak 5.000 unit; Combine harvester (mesin pemanen) sebanyak 2.790 unit; Power Thresher (mesin perontok) kedelai sebanyak 1.500 unit; Corn sheller sebanyak 2.000 unit; Dryer kap 3-6 ton bahan bakar biomassa sebanyak 390 unit; Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi sebanyak 945 unit.

"Kalau pada tahun 2012, traktor yang dibagi hanya 2.000 maka total Alsintan yang sudah kita bagikan sekarang adalah sebanyak 30.000 unit dari target total 60.303 unit. Kita bagi dan kita angkut ke masing-masing gapoktan (gabungan kelompok petani). Traktor harus diangkut karena traktor tidak bisa berjalan sendiri untuk sampai ke gapoktan" jelas Mentan.

Terkait beras, Mentan menegaskan agar distribusi beras perlu segera dibenahi

karena berdasarkan pantauannya pada 10 kabupaten di Jawa Tengah dan 4 kabupaten di Jawa Timur yang petaninya menjual beras di bawah HPP. Itu artinya, ada indikasi kalau beras tersebut tidak diserap Bulog melainkan oleh tengkulak. Perum Bulog diharapkan bisa menyerap beras petani sebanyak-banyaknya karena pada tahun 2015, Presiden telah meminta agar Bulog menyerap beras petani hingga 4,5 juta ton atau naik hampir 100%. Panen raya beras pada Maret 2015 sebanyak 2,4 juta ton sementara di April hingga saat sekarang jumlahnya mencapai 1,9 juta ton. Dari jumlah produksi tersebut, Bulog harus sigap melakukan penyerapan agar tugas tersebut tidak diambil alih tengkulak.

"Perkembangan produksi beras di masa-masa awal musim panen ini memang masih fluktuatif, pada Maret sudah ada produksi beras 2,4 juta, selama April sudah ada 1,9 juta ton. Saat musim panen, Bulog harus gencar melakukan penyerapan beras, memang ada beberapa masalah di lapangan. Misalnya soal peranan tengkulak yang dominan menyerap beras petani hingga soal harga beras petani yang tak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk masalah distribusi beras solusinya sederhana, beras harus benar-benar diserap oleh Bulog dengan membeli langsung ke petani. Dengan begitu siklusnya otomatis terpotong dimana Bulog dapat beli langsung Gabah Kering Panen petani maupun Gabah Kering Giling. Pada tahun ini Bapak Presiden pun sudah meminta agar Bulog dapat serap minimal 4 juta ton, bila perlu 4,5 juta ton," tegas Mentan.



Kementan Siapkan Anggaran Rp.368,5 M Untuk Program Revitalisasi Penggilingan Padi

"Dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang produksi padi dan beras, salah satu hal penting yang jadi sorotan pemerintah yakni masalah penggilingan beras. Sebab, penggilingan merupakan praktik riil dari apa yang telah dikerjakan di sawah, dari gabah menuju beras. Kementan menyiapkan anggaran Rp 368,5 miliar untuk program merevitalisasi atau peremajaan gilingan padi"

Untuk agenda swasembada pangan, Pemerintah begitu perhatian dalam penyediaan anggaran. Tidak hanya penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), pemerintah juga mengalokasikan dana untuk revitalisasi penggilingan gabah. Peremajaan penggilingan padi merupakan perintah langsung dari Presiden RI kepada Kementerian Pertanian. Untuk itu

Kementan menyiapkan anggaran Rp 368,5 miliar untuk program merevitalisasi atau peremajaan gilingan padi. Program tersebut sebagai salah satu upaya pencapaian swasembada beras.

"Dalam APBN-P 2015 telah dianggarkan dana Rp 368,5 miliar untuk revitalisasi penggilingan padi

berskala kecil. Anggaran ini naik lebih dari 10 kali lipat tahun sebelumnya yang hanya Rp 41 miliar. Ini bentuk perhatian pemerintah, sesuai arahan Bapak Presiden, agar membantu revitalisasi penggilingan padi skala kecil,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai Dialog Pematapan Swasembada Beras di Kantor Perum Bulog, Jakarta, (28/4).

Mentan menerangkan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki mesin-mesin penggilingan padi di tingkat petani atau kelompok tani, yang sebagian besar adalah mesin giling skala kecil dan kondisinya sudah tua sehingga tak efisien. Dana sebesar Rp 368,5 miliar itu akan digunakan untuk pengadaan 957 buah mesin penggiling padi (Rice Milling Unit / RMU) yang dibagikan ke penggilingan-penggilingan padi berskala kecil ke seluruh Indonesia.

“Tahun lalu alokasi untuk anggaran revitalisasi hanya Rp 41 miliar sedangkan tahun ini dengan nilai Rp 368,5 miliar untuk merevitalisasi 957 unit, artinya anggarannya naik 1.000% lebih. Penganggaran dengan dana lebih besar karena kita ingin menekan rendemen hingga lima persen. Dengan menekan rendemen lima persen, saya ingin loses atau kehilangan beras ketika penggilingan berkurang pesat” terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa sebelumnya dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang produksi padi dan beras, salah satu hal penting yang jadi sorotan pemerintah yakni masalah penggilingan beras. Sebab, penggilingan merupakan praktik riil dari apa yang telah dikerjakan di sawah, dari gabah menuju beras. Untuk program Revitalisasi Penggilingan Padi, Kementan akan bekerjasama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) untuk dapat membantu menekan angka losses.

“Perpadi dapat mengurangi losses sampai 2 juta ton. Dengan mesin-mesin penggiling padi yang baru, rendemen beras yang rata-rata saat ini baru sekitar 57 persen bisa meningkat sampai di atas 67 persen. Dengan demikian, angka losses menurun, produksi beras bisa bertambah sampai 2 juta ton. Targetnya menaikkan rendemen sampai 5 persen. Kalau ini dipenuhi maka kita dapat menyelamatkan 2 juta ton beras,” terang Mentan.

Mentan menjelaskan peremajaan



penggilingan padi sangat penting untuk menekan angka susut (losses) dalam proses produksi beras. Saat sekarang angka losses di Indonesia masih tinggi, di atas 13 persen. Salah satu penyebabnya ialah sekitar 90 % penggilingan padi di Indonesia masih berskala kecil dan menggunakan mesin-mesin penggilingan padi yang sudah tua sehingga tingkat rendemennya rendah. Karena alat atau mesin yang sudah tua, maka tingkat kehilangan hasil panen (padi) bisa mencapai 30%, sehingga banyak produksi padi yang terbuang. Adanya program revitalisasi mesin-mesin penggiling akan menambah pasokan beras nasional hingga 3,3 juta ton per tahun. Jika program tersebut berhasil, anggaran revitalisasi akan ditambah di tahun berikutnya.

“Indonesia hanya membutuhkan tambahan produksi beras sedikit lagi untuk mencapai swasembada beras. Bila losses ini bisa dikurangi separuhnya saja, Indonesia sudah swasembada beras. Sekarang ada losses 3,3 juta ton. Kalau ini bisa kita kurangi separuh saja dimana 3 juta ton atau minimal 1 juta ton bisa kita selamatkan tahun ini, kita tidak perlu impor dan bila masalah tingkat kehilangan hasil panen yang masih tinggi bisa diatasi dengan revitalisasi, Indonesia bisa swasembada tanpa impor. Kalau anggaran Rp 368,5 Miliar ini dapat menyelamatkan satu juta ton maka tahun depan, pemerintah akan tambah anggaran untuk revitalisasi,” jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian, Rudy Tjahjoutomo mengungkapkan swasembada pangan khususnya di bidang beras harus diperhatikan dari hulu ke hilir. Misalnya,

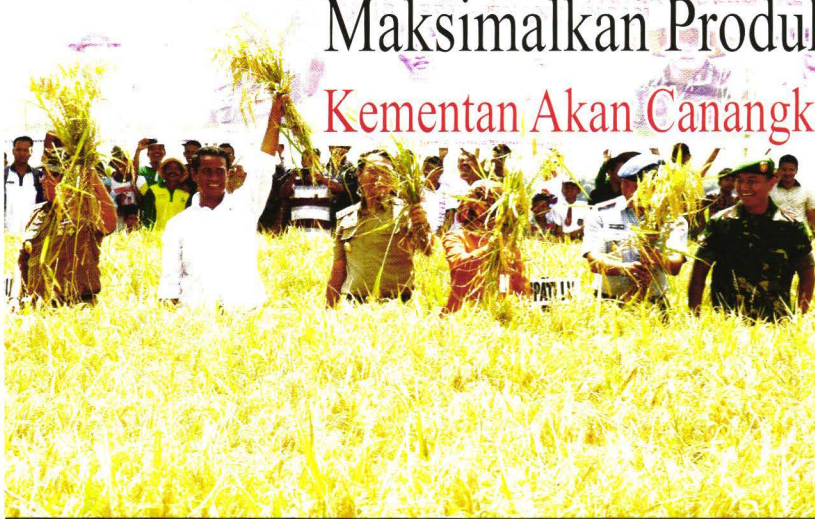
dalam hal budidaya, pembenihan, pemberantasan hama, termasuk ketika tanaman itu akan dikonsumsi dalam bentuk beras. Swasembada pangan, bukan hanya membahas gabah kering giling, tapi beras secara utuh.

Terkait penggilingan, Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian menjelaskan bahwa tinggi rendahnya rendemen beras bergantung dari cara melakukan penggilingan padi. Berdasarkan data Balitbang, idealnya susut di penggilingan gabah satu kwintal pasca digiling memperoleh beras sekitar 65 persen. Tak jauh dari standar bulog yang menetapkan sebesar 62 persen.

“Namun, kenyataan di lapangan, terutama di tempat penggilingan padi kecil, hasil susut gabah setelah digiling hanya mencapai 56-57 persen beras saja. Jadi selisih rendemennya itu 10 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah penggilingan padi kecil itu yakni sebanyak 60-70 persen atau sebanyak 160 ribuan dari total penggilingan padi yang jumlahnya sekitar 180 ribu unit” jelas Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian, Yusni Emilia Harahap juga mengatakan, dengan revitalisasi alat giling beras juga membuka peluang besar penyerapan tenaga kerja. Disebarnya 1.380 unit alat ini ke seluruh Indonesia akan dibekali teknisi yang merupakan tenaga muda daerah sehingga ada semacam bimbingan teknis bagaimana manage alat tersebut supaya kalau rusak dapat segera diperbaiki dan dapat dikelola dengan baik.

Maksimalkan Produksi Pertanian, Kementan Akan Canangkan Program Pemuda Tani



"Untuk memaksimalkan produksi di bidang pertanian, Kementan akan mencanangkan Program Pemuda Tani. Kementan perlu segera membentuk pemuda petani di seluruh Indonesia, lantaran banyaknya para pemuda yang tidak mau lagi bersentuhan dengan areal sawah dan sangat jarang yang mau bekerja menjadi petani"

Dalam upaya mengejar target swasembada pangan selambat-lambatnya tahun 2017, berbagai fasilitas bantuan pemerintah dan gerakan digalakkan di berbagai wilayah sentra padi nasional. Salah satunya adalah melalui gerakan tanam padi serentak di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Lampung, dengan luas 346.632 hektar yang saat sekarang memiliki luas sawah sebesar 38.781 hektar.

"Untuk meningkatkan produksi padi tahun 2015, Kementan mendapat alokasi APBN melalui program Upsus berupa Pengembangan Jaringan Irigasi untuk lahan seluas 10.000 hektar melalui APBN-P sebanyak 5000 hektar, Pengembangan Optimasi Lahan untuk lahan seluas 2.200 ha melalui APBN-P 2280 Ha dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu padi seluas 2.500 hektar" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat usai melakukan panen raya di Desa Medasari, Tulang Bawang, Lampung, (21/4).

Mentan menerangkan Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas lahan sawah seluas 38.781 ha dengan target luas tanam 34.769 ha, maka provinsi Lampung diharapkan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pencapaian target swasembada pangan sebesar 1 juta ton GKG. Sedangkan untuk memaksimalkan produksi di bidang pertanian, Kementan akan mencanangkan Program Pemuda Tani.

"Kami akan bentuk Pemuda Tani untuk memaksimalkan produksi pertanian, Pemuda Tani berisi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademis dan juga dari elemen pemuda lainnya. Sehingga nantinya, Pemuda Tani berasal dari pemuda yang terdiri berbagai elemen seperti mahasiswa dan organisasi kepemudaan" terang Mentan.

Menurut Mentan, pihak Kementan perlu segera membentuk pemuda petani di seluruh Indonesia, karena hal itu memiliki nilai sangat penting dan mendesak, lantaran banyaknya para pemuda yang tidak mau lagi bersentuhan dengan areal sawah dan sangat jarang yang mau bekerja menjadi petani. Padahal petani itu padahal merupakan pekerjaan mulia. Jika pekerjaan pertanian ditekuni dengan baik, maka akan menjadi mata

pencapaian yang sangat menjanjikan.

"Pemuda yang mau beternak sapi, dari satu ekor dapat saja menghasilkan Rp 1 miliar dalam setahun. Apalagi kalau pertanian kita sudah menggunakan peralatan seperti Combine Harvester, Transplanter, pemuda kita bisa terjun di pertanian pakai dasi, dengan begitu bantuan dari peralatan pertanian juga menjadi hal yang penting" ujar Mentan.

Untuk kabupaten Tulang Bawang, Mentan menjelaskan akan memberikan bantuan 112 unit traktor tangan diantaranya 1 unit traktor tangan kepada Kelompok Tani Barokah dan 2 unit untuk pesantren. Nantinya lewat dana APBNP, bantuan akan ditambah dengan traktor roda 4, sesuai dengan permintaan petani. Para petani agar dapat meningkatkan hasil lebih baik, karena pemerintah pusat akan memberikan bantuan traktor roda 4, combine harvester, pompa air, bibit unggul dan pupuk buat petani kabupaten ini. Dana sekitar Rp 800 miliar juga sudah dikucurkan untuk mendukung pertanian di Indonesia termasuk wilayah Tulang Bawang.

"Petani di Tulang Bawang sudah menerima alat panen sekaligus mengolah hasil panen jadi gabah, yakni combine harvester sebanyak 13 unit. Irigasi tersier sudah dibangun seluas 159.000 ha. Pemerintah pusat sudah membantu traktor, pupuk, dan sebagainya, jadi harus ada jaminan penambahan produksi oleh petani. Gunakan benih unggul, tanam 2 kali setahun, praktis



produksi akan naik 2 kali lipat dan hasilnya malah bisa naik 300 persen dari sekarang. Dengan teknologi pertanian yang makin maju, lahan yang ditraktor sesudah panen, bisa langsung ditanam. Kami himbau para petani jangan membiarkan lahan itu tidur. Kalau lahan dibiarkan tidur, praktis mesin-mesin menganggur, dan petani pun ikut tak bekerja" jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Tulang Bawang, Hanan Rozak menyatakan sebagai bentuk penghargaan maka Mentan dikukuhkan menjadi Bapak Modernisasi Pertanian oleh warga Tulang Bawang. Pengukuhan diberikan oleh warga karena Mentan telah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terbaru untuk petani di Tulang Bawang.

"Dengan ini kami warga Tulang Bawang mengukuhkan Bapak Menteri sebagai bapak modernisasi pertanian, selain pengukuhan gelar ini, kami dari Kabupaten Tulang Bawang berjanji untuk beras, akan menyumbang 10 persen pasokan pangan di Provinsi Bandar Lampung, apalagi daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan penghasil tebu, kelapa sawit, dan beras" kata Bupati Tulang Bawang.

Terkait UPSUS, Bupati Tulang Bawang memaparkan dengan adanya program UPSUS dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2015 pihak Kabupaten Tulang Bawang menargetkan terjadi peningkatan produksi sebesar 46.000 ton GKG dan pada 2016 terjadi peningkatan 49.000 ton, sehingga target produksi padi yang dibebankan kabupaten Tulang Bawang

sebesar 307.895 ton GKG Tahun 2015 dan 354.562 ton GKG pada tahun 2016 dapat tercapai. Sebagai penunjang melalui APBD kabupaten melakukan pembangunan irigasi air permukaan berupa pembangunan sumur bor sebanyak 54 unit, embung 1 unit dan pompa air 12 unit, disamping kebutuhan jaringan irigasi, "Guna pencapaian peningkatan produksi, petani juga sangat membutuhkan sarana prasarana penunjang dalam rangka percepatan tanam seperti jalan usaha tani sepanjang 144 km dalam kondisi rusak berat, alat mesin pertanian berupa traktor besar 40 unit, rice transplanter 201 unit, alat panen besar (combine harvester) 40 unit, Hand traktor 101 unit, Pompa air axial 186 unit" papar Bupati Tulang Bawang.

Kementan Mengajak Dekan dan Mahasiswa Membantu Pemerintah Capai Swasembada

"Kementerian Pertanian akan membentuk Pemuda Tani Indonesia dengan melibatkan sejumlah mahasiswa fakultas pertanian untuk membantu mengawasi program pemerintah. Kementerian Pertanian juga akan menggulirkan program Kawasan Terpadu Produksi Bahan Pangan atau "Food Estate" pada 2016 mendatang"



Dalam rangka pencapaian dan percepatan terwujudnya swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah merencanakan dua program baru yang dapat mendukung swasembada pangan yaitu program Pemuda Tani Indonesia dan program Food Estate.

Guna membahas dua program tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumpulkan mengundang Dekan dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian seluruh Indonesia yang berlangsung di Gedung Pusat Pelatihan Manajemen

dan Kepemimpinan Pertanian, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, (23/4).

Dalam Pertemuan tersebut yang dihadiri para Dekan dan BEM Fakultas Pertanian dari 16 perguruan tinggi di Indonesia ditambah enam Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP). Mentan menyampaikan beragam persoalan pertanian yang sedang dihadapi dan mengajak Dekan dan BEM Fakultas Pertanian seluruh Indonesia untuk membantu menyelesaikan secara bersama-sama.

"Kalau pemerintah saja yang bergerak, maka swasembada akan sulit kita capai. Kita perlu dukungan dekan dan BEM Faperta seluruh Indonesia untuk membantu mengawasi program pemerintah, Kementan akan membentuk

Pemuda Tani Indonesia dengan melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Pertanian. Kami akan membentuk Pemuda Tani Indonesia yang menggiring para mahasiswa yang sudah lulus ini turun ke pertanian," kata Mentan.

Mentan menerangkan akan ada 8.500 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan dilibatkan dalam program Pemuda Tani tersebut. Model sasaran kegiatan program Pemuda Tani adalah bergerak mengelola lahan pertanian dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Mereka memiliki tugas untuk menghidupkan lahan-lahan pertanian dan menggerakkan produksi lebih meningkat. Jadi Tugas Pemuda Tani Indonesia nantinya hampir sama seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah ada.

“Yang bergerak nanti alumni Fakultas Pertanian, dan dibimbing oleh para Dekan. Kehadiran mereka untuk membangunkan lahan yang tidur, petani yang tidur dan alsintan yang tidur. Awalnya dibentuk kelompok, masing-masing diberi bantuan alat mesin pertanian lengkap satu paket ada traktor, mesin tanam dan mesin panen, benih serta bibit,” terang Mentan.

Menurut Mentan, pola Pemuda Tani sudah berjalan di Yogyakarta, para alumni pertanian sudah turun ke lapangan. Sementara itu, mahasiswa yang ada saat sekarang baru disiapkan menjadi inkubator untuk selanjutnya setelah lulus dapat menjadi Pemuda Tani Indonesia.

“Kegiatan ini juga untuk menjawab pertanyaan mahasiswa, kenapa alumni pertanian tidak mau kembali ke pertanian. Pemuda Tani Indonesia menjadi jawabannya agar alumni-alumni Fakultas Pertanian dapat kembali memajukan petani. Mahasiswa baru yang ada saat ini sebagai inkubator yang harus disiapkan dan dikenalkan dari sekarang,” ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa selain program Pemuda Tani Indonesia, Kementerian Pertanian juga akan menggulirkan program Kawasan Terpadu Produksi Bahan Pangan atau “Food Estate” pada 2016 mendatang. Rencananya kawasan tersebut akan dibangun di Pulau Kalimantan dengan luas sekitar 500 ribu hektar yang akan ditanami tanaman pangan

seperti padi, kedelai, jagung dan tebu. Program penambahan lahan Food Estate akan melibatkan masyarakat dan pihak swasta yang hanya berkontribusi dalam hal transfer teknologi dan pendidikan wirausaha.

“Program Food Estate ini menggunakan model baru, dimana plasmanya minimal 40 persen. Kalau yang dulu konsepnya 10%-20%, sekarang kita naikkan jadi dua kali lipat ke 40%. Nantinya akan disharing dengan BUMN, bisa juga swasta. Yang jelas harus melibatkan masyarakat. Pemerintah akan menjamin porsi 40% lahan Food Estate dari total 500.000 hektare untuk petani plasma. Hal itu dilakukan untuk menghindari dominasi swasta pada salah satu program unggulan Kementerian Pertanian tersebut” jelas Mentan.

Mentan juga menyampaikan nantinya dalam pengembangan Food Estate dengan memberi porsi lahan yang lebih luas dari rata-rata lahan milik petani saat ini yaitu 0,3 hektare, sehingga petani plasma mengelola luas lahan yang mumpuni. Dengan luas lahan 500.000 ha, akan diserahkan secara khusus pada petani plasma sebesar 40% atau minimal 200.000 ha.

Mentan memaparkan dalam rencana strategisnya, Kementerian Pertanian menargetkan program Food Estate di lahan seluas 500.000 ha. Untuk penyediaan lahan, Kementan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (LHK). Adapun, program akan mulai dikembangkan pada 2016 mendatang. Lahan 500.000 tersebut akan mencakup beberapa wilayah di Maluku dan Kalimantan yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, 14 Kabupaten di Kalimantan Tengah, dan 8 Kabupaten di Kalimantan Barat.

“Selain melibatkan pihak swasta, program Food Estate akan melibatkan BUMN dalam manajemen Food Estate. Kendati demikian, saya belum menjajaki secara khusus perusahaan plat merah mana yang akan diajak mengelola Food Estate. Yang jelas, masyarakat akan kita libatkan, sedangkan peran sektor swasta, nantinya mereka akan dilibatkan dalam proses pemanfaatan teknologi dan pendidikan wirausaha. Untuk meningkatkan produktivitas, akan diterapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan Food Estate” papar Mentan.

Mentan mengaku belum dapat merincikan berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan Food Estate, tetapi dirinya sempat menyampaikan alokasi pengelolaan akan dimasukkan ke rencana anggaran Kementerian Pertanian pada APBN 2016 mendatang. Kementerian Pertanian tetap menargetkan swasembada dapat terwujud dalam waktu tiga tahun, berbagai perbaikan dan pembenahan dilakukan mulai dengan irigasi yang 52 persen rusak, penyaluran benih dan pupuk, serta ketersediaan alat mesin pertanian dan penyuluh.



Jalankan UPSUS Swasembada Pangan Kementan Canangkan IP 200 dan 300



“Dalam UPSUS swasembada pangan, terdapat dua hal penting yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan Indeks Pertanian (IP) dan produktivitas. Pihak Kementan sangat mengapresiasi kegiatan pencaangan IP 200 dan 300 di Sumsel agar provinsi tersebut menjadi daerah terdepan mendukung swasembada beras nasional”

Dalam rangka mempercepat musim tanam dan menambah luas tanam padi di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Banyuwasin yang merupakan daerah sentra produksi padi, Kementerian Pertanian melakukan pencaangan Indeks Pertanian (IP) 200 dan 300 di Desa Talang Giring, Kecamatan Madang Suko II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (20/4)

Kegiatan pencaangan IP 200 dan 300 merupakan program pengembangan irigasi guna menuju 1 juta ton GKP di Sumatera Selatan dalam rangka mensukseskan program Upaya Khusus (UPSUS) swasembada beras nasional tiga tahun ke depan. Menteri Pertanian menyatakan pihak Kementan sangat mengapresiasi kegiatan pencaangan IP 200 dan 300 agar OKU Timur agar dapat menjadi daerah terdepan mendukung swasembada beras nasional.

“Kami mengapresiasi kegiatan pencaangan IP 200 dan IP 300. Hal itu agar OKU Timur dapat menjadi daerah terdepan mendukung swasembada beras nasional. Peningkatan IP harus didukung oleh perbaikan jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air, ketersediaan alsintan yang cukup, benih dan pupuk,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai melakukan penanaman secara manual bersama petani sebagai tanda penanaman perdana Indeks Pertanian 200 (IP 200) dan Indeks Pertanian 300 (IP 300).

Mentan menerangkan sebelumnya, IP di OKU Timur hanya sebesar 100, sekarang ada penambahan IP dengan luas lahan tanam IP 200 dan 300 pada areal lahan sebesar 6.021 Ha dari luas total yang ada sekitar 10.000 Ha Dengan adanya tambahan IP tersebut didukung jaringan irigasi yang sudah diperbaiki maka daerah OKU Timur akan dapat menghasilkan gabah yang lebih banyak sehingga mendukung pencapaian swasembada beras.

“Selama ini petani Talang Giring hanya dapat memanen padi setahun sekali, tetapi dengan adanya pencaangan IP 200 dan IP 300 dengan dukungan jaringan pengairan tersier seluas 6.021 ha daerah Muncak Kabau di Kabupaten Oku Timur maka harapannya petani dapat menanam dua kali dalam setahun sehingga meningkatkan jumlah produksi padi” terang Mentan.

Menurut Mentan, program UPSUS untuk mendorong petani dalam peningkatan produksi pangan, sedangkan pencaangan Indeks Pertanian dilakukan sebagai bagian Program Upaya Khusus untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan, mengingat dalam Upaya Khusus (UPSUS) swasembada pangan, terdapat dua hal penting yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan Indeks Pertanian (IP) dan produktivitas.

“Peningkatan IP artinya yang biasa tanam satu kali menjadi dua kali, kemudian produktivitas akan ikut mengalami peningkatan. Dari bulan Oktober 2014 hingga Maret 2015, program UPSUS ini sudah ada peningkatan tambahan tanam sekitar 700.000 hektare. Apabila dapat

berproduksi 5 ton maka jika di kali lima maka menjadi 3,5 juta ton dan jika di kali enam maka menjadi 4,2 juta ton, dengan demikian, swasembada pangan diyakini dapat tercapai” imbuh Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai strategi untuk menjamin ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia. Dengan merealisasikan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun maka pada 2016, Indonesia tidak akan lagi impor beras. Sedangkan untuk mempercepat swasembada pangan harus dimulai dari membenahi seluruh infrastruktur

“Selain perbaikan infrastruktur, perlu dilakukan juga pembenahan lahan, seperti perbaikan sodetan di lahan pasang surut. Sodetan tersebut sangat efektif lantaran berfungsi untuk memperdalam aliran air sungai. Jadi kita bangun atau perbaiki sodetan. Prinsipnya jangan biarkan lahan tidur, meskipun ini sudah dimanfaatkan tapi harus dioptimalkan,” jelas Mentan.

Mentan memaparkan pihak Kementan akan memberikan bantuan dana kisaran Rp 800-Rp 900 miliar untuk provinsi Sumatera Selatan. Dana dari APBN tersebut antara lain diperuntukan pengadaan bibit dan irigasi agar produksinya dapat meningkat. Bahkan, bila berhasil Kementan akan menambah bantuan tersebut supaya ketahanan pangan di berbagai daerah semakin meningkat.

“Pada tahun ini pemerintah menyiapkan bantuan dana sekitar Rp 20 triliun dan untuk provinsi Sumatera Selatan akan diberikan sekitar Rp 900 miliar Dana

tersebut akan digunakan untuk pengadaan bibit dan irigasi agar dapat meningkatkan produktivitas, pembangunan irigasi, pengadaan benih dan pupuk, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dahi bantuan tersebut pada tahun depan akan ditambah jika produktivitas petani di lahan tersebut meningkat sekitar 1,3 juta ton"papar Mentan.

Mentan menyatakan dalam upaya meningkatkan produksi padi dengan kucuran dana yang lebih besar maka skala prioritas daerah tanam padi, untuk Sumatera antara lain di Sumsel dan Jambi. Sementara di luar itu yakni Kalimantan Timur termasuk tanam padi IP 200. Produksi padi di Sumatera

Selatan diperkirakan akan meningkat karena adanya perluasan tanam.

"Selain perluasan tanam juga ada penanaman pada areal tanam sebanyak dua kali sehingga produksi tersebut akan meningkat. Bila Sumsel produksinya akan meningkat sekitar 1,3 juta ton maka berarti produksi padi dalam meningkatkan ketahanan pangan diperkirakan akan berhasil karena semua daerah telah memaksimalkan taman padi" kata Mentan.

Kepada Tim UPSUS Sumatera Selatan, Mentan mengungkapkan bahwa pihak Kementan telah memberikan bantuan pada OKU Timur berupa hand traktor 280 unit, perbaikan jaringan irigasi sebesar

1.500 hektare, combain harvester, transplanter, alat perontok jagung, dan pompa air. Akan diberikan tambahan bantuan apabila pelaksanaan IP 200 dan 300 berjalan dengan sukses.

"Jika pelaksanaan IP 200 dan 300 berjalan dengan sukses, bantuan akan saya tambah yakni handtraktor sebanyak 206 unit. Pemerintah daerah diharapkan agar bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan petani. Evaluasi bantuan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan petani dan jumlahnya pun sesuai yang dibutuhkan oleh daerah," ungkap Mentan.



Pertanian Sulsel Mendapat Perhatian Khusus Dari Kementan

"Kementan akan memberikan perhatian khusus untuk kemajuan pertanian di Sulsel yang merupakan salah satu tulang punggung hasil pertanian Indonesia. Sulsel memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya yang dapat mencapai 8,2 persen. Contohnya produksi jagung di Kabupaten Jeneponto, petani menggunakan benih unggul NK 212 mampu menghasilkan rata-rata enam ton per hektare (ha) dari tiga ton per ha."

Dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan pada komoditi jagung, Kementerian Pertanian akan mengupayakan Kabupaten Jeneponto, di propinsi Sulawesi Selatan untuk bisa menjadi sentra produksi jagung lebih besar lagi, dan bisa bersaing dengan daerah lain. Untuk itu Kementan akan memberikan perhatian khusus untuk kemajuan pertanian di Sulsel yang merupakan salah satu

tulang punggung hasil pertanian Indonesia selain Jawa Timur.

"Selama ini yang banyak dicari selalu yang produk pertanian impor, termasuk jagung. Mengingat Indonesia akan segera memasuki era pasar bebas, jagung Jeneponto harus bisa bersaing. Saya ingin kedepan, kalau bisa nantinya jagung produk dari Jenepontolah yang dicari." kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan panen raya jagung dan penanaman perdana program GP-PTT

2015 di Desa Mangepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto Sulsel (4/4).

Atas terlaksananya panen, Mentan menyatakan mengapresiasi kegiatan panen raya tersebut dan memberi apresiasi kepada anggota DPR RI Komisi IV asal Sulawesi Selatan yang telah berjuang memfasilitasi Jeneponto untuk bantuan pertanian di daerah tersebut. Dirinya berjanji akan memberi perhatian lebih untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Jeneponto.

Khususnya, memfasilitasi bantuan di bidang pertanian untuk memajukan daerah tersebut.

"Saya mengapresiasi segala upaya Anggota DPR RI Komisi IV asal Sulawesi Selatan yaitu Indira Chunda Thita Syahrul dan Hamka B. Kady serta yang lainnya, yang telah berjuang memfasilitasi Jeneponto untuk bantuan pertanian di daerah ini, saya berharap lebih pada Jeneponto untuk memberikan kontribusi maksimal pada sektor jagung nasional. Kita memberikan bantuan benih jagung 450 ton untuk menjadikan Jeneponto sebagai sentra produksi jagung secara nasional bukan hanya untuk Sulawesi Selatan saja," ujar Mentan.

Mentan mengatakan Jeneponto akan diberi perhatian untuk memfasilitasi bantuan di bidang pertanian dalam memajukan daerah tersebut. Kementerian Pertanian menyalurkan 2.000 unit lebih alat mesin pertanian untuk Sulawesi Selatan guna mendukung produksi pertanian di daerah itu. Pemberian Alsintan tersebut merupakan bagian dari program mekanisasi pertanian termasuk salah satu dari lima pilar untuk mendukung sektor pertanian.

"Untuk mendukung Sulsel sebagai daerah penyangga pangan nasional, kami menyalurkan 2.000 unit lebih Alsintan dan sebanyak 101 unit ditujukan untuk Kabupaten Jeneponto, karena Alsintan merupakan salah satu dari lima pilar lainnya seperti ketersediaan irigasi yang baik, benih, pupuk dan dukungan penyuluh. Apabila kelima hal itu tersedia, maka sektor pertanian akan berkembang dan produksinya dapat optimal" kata Mentan.

Selain alsintan, Mentan menerangkan

bantuan lain juga diberikan seperti tambahan lahan untuk jagung sebesar 10 ribu hektare dari yang sebelumnya 6 ribu hektare, serta telah menyetujui perbaikan dua bendungan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Wajo, Sulsel. Sedangkan, untuk bendungan di Jeneponto, dirinya belum mengecek dan baru akan melihatnya terlebih dahulu.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya yang dapat mencapai 8,2 persen. Contohnya, untuk produksi jagung di Kabupaten Jeneponto setelah menggunakan benih unggul NK 212, maka mampu menghasilkan rata-rata enam ton per hektare (ha) dari tiga ton per ha. Hanya saja, peningkatan produksi jagung itu belum diikuti dengan kenaikan harga di tingkat petani. Hal itulah yang dikeluhkan para petani jagung selama ini. Oleh sebab itu, dirinya meminta Bulog untuk menjaga harga jagung tetap stabil seperti halnya pada hasil pertanian kedelai.

"Pihak Bulog mendapat tugas dari pemerintah untuk menstabilisasi harga jagung, padi dan kedelai yang kerap berfluktuasi. Masalah itu sudah diserahkan ke Bulog untuk stabilisasi harga ketiga jenis pangan itu. Karena sekarang ada Komisaris Bulog yang hadir, saya sampaikan langsung agar Bulog bisa turut andil untuk menjaga agar harga jagung tetap stabil seperti yang diharapkan petani. Dengan begini, para petani jadi lebih bergairah menanam dan produksi akan terus meningkat," jelas Mentan.

Terkait swasembada pangan, Mentan kembali menegaskan Indonesia bisa swasembada pangan, dan Indonesia tidak

perlu impor beras, kedelai, jagung dan lainnya. Pihak Kementanpun sangat yakin dalam empat bulan mendatang akan terdapat peningkatan produksi padi, kedelai dan jagung. Kedepannya untuk harga jagung, Badan Urusan Logistik yang akan melakukan penyerapan. "Dengan adanya peningkatan produksi jagung, nantinya Indonesia tak lagi impor jagung dan Bulog bisa menjadi stabilisator yang bukan mencari keuntungan semata. Apalagi pada dua minggu ke depan, 8 menteri keuangan dari negara-negara luar akan bertemu. Saat itu Kami akan sampaikan, Indonesia bisa swasembada, tanpa impor," tegas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, tidak alasan bagi Sulsel termasuk Jeneponto untuk tidak memajukan pembangunan di bidang pertanian. Pasalnya anggota Komisi IV DPR RI banyak berasal dari orang Sulawesi Selatan. Apalagi saat sekarang Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama tingkat pendapatan petani di Indonesia. Rata rata sebanyak 3,3 triliun perbulannya artinya perpetani rata-rata pendapatan di atas 10 juta perbulannya termasuk petani jagung yang ada di Jeneponto.

Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu juga berharap agar pemerintah dapat memberi perhatian besar terhadap daerahnya yang masih kategori tertinggal agar keluar dari predikat tertinggal dibanding daerah lain. Oleh karena itu perbaikan irigasi Karelloe di Jeneponto segera dapat diwujudkan untuk mendorong peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Jeneponto.





Kementan Maksimalkan Pemanfaatan Potensi Pertanian Tabanan

"Potensi besar dalam bidang pertanian Kabupaten Tabanan yang selama ini dikenal sebagai daerah gudang beras di Bali dapat dimanfaatkan maksimal. Pemkab Tabanan agar terus meningkatkan pembangunan sektor pertanian sehingga swasembada pangan makin kuat sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani"

Prestasi kabupaten Tabanan-Bali yang mampu berswasembada pangan membuat pihak Kementerian Pertanian semakin optimis bahwa nantinya Indonesia ke depan tidak perlu lagi mengimpor beras dan kebutuhan pokok lainnya karena produksi pertanian yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Atas prestasi tersebut Menteri Pertanian mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan masyarakat petani di Tabanan, Bali.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan, Bali, yang telah mampu berswasembada pangan, yakni produksi pertanian melebihi kebutuhan masyarakat setempat. Saya juga menyatakan rasa syukur serta terima kasih terhadap masyarakat Tabanan dan berharap agar selalu meningkatkan pembangunan di bidang pertanian sehingga kita tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menghadiri panen perdana padi di Kelating, Tabanan Bali (9/4).

Walaupun Tabanan telah dapat mempertahankan produksi beras dengan hasil tertinggi di Bali yaitu 111.000 ton lebih. Dibandingkan dengan kebutuhan beras masyarakat Tabanan sebesar kurang lebih 56.000 ton, sehingga Tabanan masih surplus beras 49.000 lebih, tetapi Mentan menghimbau agar Pemkab Tabanan dapat meningkatkan lagi produksi padi minimal 20 persen dari hasil yang telah dicapai sekarang.

"Saya melihat potensi di Tabanan masih sangat bagus. Saya minta, kalau bisa hasil produksi padi bisa ditingkatkan lagi minimal 20 persen, Saya harap Pemkab Tabanan agar terus meningkatkan pembangunan sektor pertanian sehingga swasembada pangan makin kuat sekaligus mengangkat harkat dan martabat petani" himbau Mentan.

Kepada Pemerintah Daerah dan para petani Tabanan, Mentan menegaskan agar jangan sampai menunda tanam padi dan jangan pernah membiarkan lahan pertanian tidak digunakan, apalagi jangan biarkan masyarakat petani menganggur. Petani harus terus bersemangat dan konsisten melaksanakan pembangunan pertanian sebagai mata pencaharian, serta sebagai motivasi generasi muda untuk melanjutkan pembangunan bidang pertanian.

"Mari kita bangun bangsa ini maju sampai ke dunia internasional, para generasi muda harus mencintai pertanian. Sebagai generasi muda penerus bangsa harus mencintai pertanian. Sebab dengan bertani, kehidupan kita bisa terjamin yang tentu saja harus menggunakan pola-pola modern. Dengan demikian potensi besar dalam bidang pertanian di Kabupaten Tabanan yang selama ini dikenal sebagai daerah gudang beras di Bali dapat dimanfaatkan maksimal" tegas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa permintaan target peningkatan produksi juga melihat sejumlah bantuan telah digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN yang telah disalurkan kepada petani. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar bagi Kabupaten Tabanan diantaranya APBNP 2015 untuk Perbaikan Irigasi 10.500 Ha, Optimasi lahan 1.500 Ha, Alsintan 24 unit, Pompa Air 20 unit, Saprotan Jagung 1.000 Ha, SRI 200 Ha, Corn Celler 5 unit.

"Bantuan itu bertujuan mewujudkan masyarakat yang berinovasi dan lebih semangat dalam menggeluti pertanian. Semoga saja, data bantuan yang diberikan ini sudah benar, jadi dengan bantuan yang telah diberikan pusat baik itu anggaran untuk irigasi, optimalisasi lahan dan alat alat pertanian saya harap target itu dapat tercapai," jelas Mentan.

Menanggapi permintaan Mentan, Sekretaris Daerah Tabanan Bali Nyoman Wirna Ariwangsa menyatakan Tabanan sebagai "gudang beras" siap menjadi pusat perkembangan pertanian organik Bali bahkan nasional. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tahun 2015 pihaknya memiliki program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi seluas 2500 Ha. Selain itu juga gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai seluas 500 Ha, pengembangan jaringan irigasi 3000 Ha dan pengoptimalisasi lahan.

"Hingga kini Pemerintah Kabupaten masih mampu mempertahankan produksi beras dengan hasil tertinggi di Bali yakni 111.000 Ton lebih per tahun, sementara kebutuhan masyarakat setempat hanya sekitar 56.000 ton. Dengan demikian Tabanan masih surplus 55.000 lebih, sehingga predikat lumbung beras masih tetap layak untuk daerah ini. Walaupun demikian ternyata masih banyak kendala yang dihadapi kami terutama masalah infrastruktur" kata Sekda Tabanan.

Sekda Tabanan mengungkapkan bahwa pihaknya masih menghadapi banyak hambatan dan kendala. Kendala tersebut antara lain menyangkut pembangunan infrastruktur sehingga masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Dan meskipun Tabanan telah mampu swasembada pangan, namun frekuensi tanam dan produktivitas menjadi kendala sehingga kontribusinya masih rendah, akibat ketersediaan air mulai terbatas, aspek klimatologis yang tidak dapat diprediksi dan kurangnya sumber daya manusia dimana minat masyarakat untuk bertani juga menurun serta ahli fungsi lahan yang tidak dapat dihindarkan.

Bukti Mampu Swasembada Daging

Pemkab Bone Gelar Expo dan Kontes Ternak Sapi

"Expo dan Kontes Ternak sapi 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Bone mampu memberikan kontribusi 30% produksi sapi ternak di Sulsel bahkan di Indonesia, dan bisa dijadikan dukungan dalam mewujudkan swasembada daging. Expo dan Kontes Ternak sapi 2015 adalah salah upaya pemkab Bone dalam mewujudkan swasembada daging nasional serta menginformasikan kepada masyarakat Bone bahwa daerahnya merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Sulsel"



Salah satu bukti konkrit bahwa P e m p r o v Sulawesi Selatan b e r s a m a kabupaten kota siap membantu pemerintah pusat dalam swasembada daging adalah pelaksanaan Program Swasembada 2 juta sapi yang dilakukan hingga tahun 2018 dan sebagai bukti daerah tersebut mampu swasembada daging maka Pemkab Bone menggelar Expo dan Kontes Ternak Tahun 2015. Acara tersebut dapat menyakinkan pemerintah pusat akan kesiapan daerah Sulsel melaksanakan program ketahanan pangan.

"Saya akui kontribusi produksi ternak sapi terbaik Sulsel adalah di Kabupaten Bone. Produksi ternak sapi di kabupaten Bone relevan memberikan kontribusi 30% produksi ternak sapi di provinsi Sulsel, adanya kontes sapi ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Bone mampu memberikan kontribusi 30% produksi sapi ternak di Sulsel bahkan di Indonesia, dan ini bisa dijadikan dukungan dalam mewujudkan swasembada daging" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menghadiri acara Expo dan Kontes Ternak di Watampone Bone Sulsel (4/4).

Dalam acara tersebut, Mentan menuturkan Indonesia merupakan negara pengimpor sapi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia mengimpor satu juta ekor sapi per tahun. Padahal, Indonesia sudah bisa mengekspor sperma sapi untuk inseminasi buatan ke Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.

"Saat melakukan kunjungan ke Singosari, Jawa Timur beberapa waktu lalu, saya mendapat laporan dari Kepala Balai bahwa setelah sperma sapi diekspor dan ditenakkan di luar negeri, kembali

mengimpor sapi-sapi tersebut. Tetapi mulai saat ini juga, saya hentikan ekspor kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutur Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa penghentian ekspor sperma sapi ke sejumlah negara seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, karena sperma sapi itu digunakan untuk inseminasi buatan di luar negeri. Mirisnya sapi-sapi hasil inseminasi buatan itu akan ditenak di luar negeri dan nantinya akan diimpor kembali ke Indonesia.

"Jadi Indonesia akan membayar mahal sapi yang sebenarnya berasal dari dalam negeri. Alangkah lebih baik jika inseminasi buatan itu dilakukan di Indonesia. Untuk itu Kementan telah mengambil keputusan bahwa semua balai harus mengumpulkan sperma unggulan yang dibuat untuk inseminasi buatan. Kita akan sumbangkan ke seluruh masyarakat Indonesia, kurang lebih 2 juta asseptor," terang Mentan.

Dihadapan peserta Expo dan Kontes Ternak, Mentan berjanji memberikan bantuan 300.000



semen baku (bibit sapi berupa sperma yang dibekukan) untuk program Inseminasi Buatan (IB). Program IB dilakukan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan dan memperbaiki mutu genetik ternak sapi di Bone. Untuk Sulawesi Selatan, Kementan akan melakukan inseminasi buatan terhadap 300.000 ekor sapi sepanjang 2015. Inseminasi buatan termasuk terbesar sepanjang sejarah di Sulawesi Selatan. Pihak Kementan tidak akan bermain-main dan akan mewujudkan kesejahteraan harapan para petani padi dan ternak di seluruh Nusantara.

"Kalau 300.000 ini berhasil 70 persen, berarti akan ada tambahan sapi 200.000 ekor. Kita berharap bantuan bibit sapi ini sukses di Bone, selain itu akan dibagikan 200 ekor sapi betina kepada para peternak di Kabupaten Bone, ada juga bantuan pembangunan RPH (Rumah Potong Hewan). Sekarang kita harus berfikir bahwa yang diimpor adalah daging, jadi jangan lagi impor sapi hidup. Pengimporan beras dan sapi akan diupayakan untuk dihentikan, langkah ini sebagai salah bukti pemerintah pusat akan berjuang terhadap kesejahteraan petani padi maupun ternak." ungkap Mentan.

Terkait swasembada pangan, Mentan mengungkapkan Kabupaten Bone dapat menjadi salah satu daerah percontohan pangan dalam memenuhi target swasembada pangan dari pemerintah

pusat, mengingat kabupaten Bone memiliki paket lengkap dalam membantu mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut dikarenakan Bone berpotensi di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, Potensi dari 8 juta Ha sawah yang ada sudah dapat mencukupi kebutuhan nasional bahkan kelebihannya bisa diekspor.

"Jika produktivitas padi 10 ton per Ha, artinya ada produksi sebesar 80 juta ton untuk satu masa tanam. Produktivitas ini cukup tinggi namun masih dapat ditingkatkan. Kalau dilakukan dua kali tanam, maka hasilnya sebesar 160 juta ton, padahal Indonesia cuma butuh 60 juta ton, bila diekspor 100 juta ton, dikalikan harga Rp 4.000, itu Rp 400 triliun nilainya, dan bisa menghidupi Asia Tenggara," ungkap Mentan.

Untuk mendorong Bone menjadi daerah lumbung beras di Provinsi Sulawesi Selatan, Mentan menjelaskan kabupaten Bone mendapat bantuan di sektor pertanian baik irigasi tersier, benih, dan hand tractor untuk dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dengan bantuan tersebut masyarakat petani dapat memanfaatkan dengan benar sehingga produksi pertanian meningkat.

"Untuk irigasi tersier, Bone mendapat bantuan sampai 35.000 hektare dan tahun ini di targetkan selesai. Sulawesi Selatan

sendiri mendapat bantuan bibit dan benih, masing-masing jagung 20 ribu hektare, kedelai 56 ribu hektare, dan traktor tangan 88 unit. Saya minta pemberian bantuan ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, dan saya harap bantuan ini bisa mendorong Bone menjadi daerah lumbung beras di Provinsi Sulawesi Selatan" jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone Aris Handono mengatakan kegiatan Expo dan Kontes Ternak sebagai salah upaya pemkab Bone dalam mewujudkan swasembada daging nasional serta menginformasikan kepada masyarakat Bone bahwa daerahnya merupakan daerah penghasil sapi terbesar di Sulsel. Selain itu melalui moment expo iitu, Pemkab Bone mampu merealisasikan daerah sehat dan sejahtera.

"Expo dan Kontes Ternak yang digelar menghadirkan beberapa sapi jenis limousin dari beberapa peternakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone. Hingga tahun 2014, terdapat 307.000 ekor populasi ternak sapi di daerah ini. Dan jumlah tersebut akan akan meningkat sebesar 6% pada tahun 2015 serta merealisasikan program Pemerintah Kabupaten yakni menjadi daerah Bone yang sehat dan sejahtera", kata Kadis Peternakan Kabupaten Bone.

Mentan Ingatkan Provinsi Maluku Pentingnya Ketahanan Pangan

"Memperkuat ketahanan pangan menjadi hal yang penting karena bila ketahanan pangan ini lemah maka ketahanan Negara akan terancam dan kriminalitas akan meningkat dengan begitu kedaulatan negara juga akan terancam. Untuk meningkatkan ketahanan pangan salah satunya dengan membangun potensi yang bersumber dari pertanian"



Kementan
menyadari pentingnya
ketahanan pangan
untuk rakyat Indonesia
khususnya bagi para
petani, mengingat jika

ketahanan pangan lemah maka kedaulatan negara akan terancam. Presiden juga telah memberikan instruksi langsung terkait dengan pentingnya ketahanan pangan serta memperhatikan nasib para petani agar bisa mendukung program pemerintah

mencapai swasembada.

"Mulai saat ini kita bangun pertanian, karena kalau ketahanan pangan ini lemah

maka ketahanan Negara akan terancam dan kriminalitas akan meningkat. Jika ketahanan pangan lemah maka kedaulatan negara juga akan terancam” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai panen raya di Desa Waekasar, Kabupaten Buru, Maluku (25/4).

Menurut Mentan untuk mendukung percepatan swasembada pangan di Kabupaten Buru terutama padi, jagung, dan kedelai, pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kegiatan berupa, pengembangan jaringan usaha tani tersier 1.200 hektar pada APBN, dan 1.850 hektar pada APBN-P. Pengembangan optimasi lahan mendukung tanaman pangan seluas 1.000 hektar APBN dan 2.000 hektar APBN-P.

Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buru, Mentan mengajak untuk meningkatkan ekonomi, yang salah satunya bersumber dari pertanian. Apabila hasil produksi pertanian tahun 2015 naik maka dipastikan akan ada peningkatan anggaran pertanian untuk daerah-daerah di Tanah Air. Jika produksi pertanian khusus di Buru naik hingga 20 persen tahun 2015, maka dipastikan anggaran APBN-P juga akan dinaikan sebesar 20 persen, baik untuk Provinsi Maluku maupun Kabupaten Buru.

“Kementerian Pertanian akan meningkatkan bantuan petani di provinsi Maluku. Apabila produksinya meningkat, kami akan menambah anggaran tahun depan. Tetapi apabila tidak naik produksinya berarti bapak-bapak atau ibu-ibu petani tidak mencintai keluarganya. Untuk itu jangan biarkan lahan tidur. Singsingkan lengan baju dan turun ke sawah, jangan biarkan lahan itu terlantar, apabila lahan itu tidak digarap maka petani juga menganggur” ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa pihak Kementerian Pertanian mencatat dalam periode Oktober 2014 hingga Maret 2015 terdapat tambahan luas lahan pertanian padi seluas 700 hektare. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan produksi bisa mencapai tiga juta ton. Untuk itu kepada Gubernur Maluku dan Bupati Buru harus memiliki semangat dan menyisihkan lengan baju ikut turun ke sawah demi pembangunan pertanian kedepan yang lebih baik.

Terkait petani, Mentan memaparkan sejak awal mula pembentukan kabinet kerja, Presiden RI telah meminta agar pihak Kementan memperhatikan petani dengan mendatangi dan langsung menemui para petani dan berdiskusi terkait segala permasalahan yang dihadapi petani agar bisa diselesaikan demi peningkatan pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk melindungi para petani, Kementan dan jajaran pemerintah lainnya sepakat untuk tidak membuka keran impor beras.

“Kita harus meningkatkan kehidupan perekonomian para petani, untuk itu kami diminta bapak Presiden memperhatikan para petani dengan bertemu langsung melakukan diskusi, dan lain sebagainya mengenai apa saja kendala-kendala atau masalah yang dihadapi di lapangan, Terbukti sampai sekarang sejak kabinet kerja berjalan, tidak ada lagi impor beras dan harga beras sudah stabil,” papar Mentan.

Dari hasil temu wicara dengan para kelompok tani yang ada di Kabupaten Buru, Mentan mengaku telah mengetahui beberapa kendala yang dihadapi petani di lapangan, khususnya distribusi pupuk yang kurang, bibit padi yang kurang baik, serta kurangnya sarana irigasi atau kondisinya yang tidak layak sehingga dukungan air

kepada para petani kurang mencukupi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Buru Ramli Umasugi menerangkan kondisi pertanian di kabupaten Buru yakni, Potensi lahan sawah di Kabupaten Buru seluas 1.000 hektar. Lahan baku 7.200 hektar yang rata-rata pemanfaatannya permusim tanam seluas 5.000 hektar. Untuk realisasi telah dilakukan tanam padi sawah pada musim tanam 1 periode Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 sebesar 4.323 hektar.

“Realisasi panen padi sawah sampai tanggal 22 April 2015 seluas 2.585 hektar dengan rata-rata produktifitas 4,8 ton gabah kering giling/ha. Aktivitas penanaman terus berjalan di beberapa desa pada dataran Waeapo, Dan saat ini petani sedang disibukkan dengan kegiatan panen dan persiapan penanaman pada musim tanam pertama tahun 2015” terang Bupati Buru.

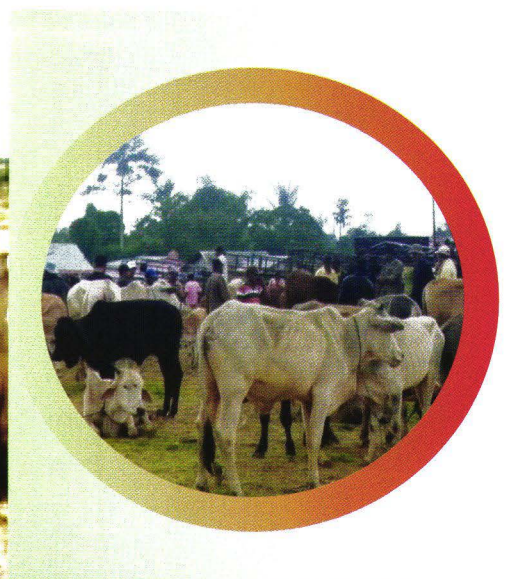
Terkait swasembada, Bupati Buru menjelaskan beberapa faktor yang menghambat terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Buru yakni, proses pekerjaan dan pembuatan serta perbaikan pada bendungan Waeleman dan Waepamali belum rampung. Status kepemilikan lahan di beberapa lokasi belum terselesaikan yakni di Waeleman, Waelo, Waitina dan Waflan.

“Beberapa lokasi lahan proaktif padi sawah telah beralih fungsi, mulai langka dan mahalnya tenaga kerja proaktif terutama pada saat tanam dan panen. Sedangkan rencana tanam perdana padi dan jagung akan dilakukan di Desa Wanareja, Kecamatan Waeapo pada 6 Mei 2015. Areal penanaman tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pemprov pertanian modern” jelas Bupati Buru.





Pulau Buru Miliki Potensi Pengembangan Ternak Sapi



Dibandingkan dengan daerah dan provinsi lain di Indonesia, Pulau Buru di Provinsi Maluku masih tergolong rendah dalam produktivitas untuk tanaman pangan, tetapi ternyata kawasan Pulau Buru berpotensi untuk dijadikan salah satu tempat pengembangan usaha peternakan sapi di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian berencana akan mengadakan kerjasama dengan investor asing di bidang peternakan.

"Produksi pertanian di Pulau Buru perlu ditingkatkan karena daerah itu memiliki potensi yang luar biasa. Pulau Buru bagus untuk peternakan karena merupakan lokasi yang potensial untuk peternakan sapi. Sedangkan untuk produksi padi, karena produktivitasnya masih rendah diharapkan mampu ditingkatkan" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, (27/4).

Mentan menjelaskan sebagai tindak lanjut upaya pengembangan peternakan sapi di provinsi Maluku, pihak Kementan merencanakan sebuah ranch atau lahan peternakan sapi di tempat tersebut. Dalam hal ini, Kementan juga mendapatkan dukungan dari Pem-Prov Maluku.

"Untuk merealisasi upaya kami, pihak Kementan pun merencanakan sebuah lahan peternakan sapi (ranch) di tempat itu. Kami akan mengembangkan ranch seperti di Australia. Gubernur Maluku, juga telah menyatakan dukungannya atas rencana kami dengan mempersiapkan lahan 80.000 hektar," jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan selain di Pulau Buru, ada beberapa daerah lainnya yang dinilai potensial menjadi tempat

"Program intensif pengembangan peternakan sapi memang menjadi salah satu perhatian Kementan. Ada beberapa daerah lainnya yang dinilai potensial menjadi tempat pengembangan usaha peternakan sapi. Skala prioritas cocok untuk wilayah pengembangan sapi di wilayah Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku. Pulau Buru di Provinsi Maluku bagus untuk peternakan karena merupakan lokasi yang potensial untuk peternakan sapi"

pengembangan usaha peternakan sapi. Skala prioritas cocok untuk wilayah pengembangan sapi di wilayah Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku. Program intensif pengembangan peternakan sapi memang menjadi salah satu perhatian Kementan. Hingga saat sekarang, total investasi yang tengah direncanakan tersebut mencapai sekitar 1 triliun Rupiah.

"Nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun peternakan sapi di Pulau Buru yakni sekira Rp 100 miliar, dengan lahan peternakan seluas 5.000 hektare. Sebagai informasi, saat ini di Pulau Buru terdapat lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 100.000 hektare yang dapat digunakan untuk beternak 200.000 ekor sapi" ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa dana yang akan digelontorkan oleh investor seperti dari Brazil diperkirakan bisa mencapai kisaran Rp 1 triliun. Dari pihak Kementan menawarkan lahan seluas 20.000-30.000 hektare di Pulau Buru bagian Utara, dan 70.000 hektare di Pulau Buru bagian Selatan. Dirinya menjamin pembangunan peternakan tidak akan mengusir sawah-sawah penduduk karena dibangun di lahan APL. Saat sekarang ada beberapa investor yang tengah melirik Pulau Buru untuk

investasi peternakan, selain dari Brazil, juga ada investor lokal. Australia juga berminat untuk melakukan investasi, namun masih baru memasukkan permohonan.

"Jadi untuk pengembangan peternakan sapi Pulau Buru Utara dengan dana Rp 200-300 miliar. Jika ada lahan kurang lebih 100.000 hektar berarti kurang lebih Rp 1 triliun. Di samping investor asal Brasil yang sudah datang langsung melihat calon lokasi di Pulau Buru, ada 1 calon investor asal Brasil lain dan 3 calon investor dari dalam negeri yang juga berminat membangun peternakan di Pulau Buru. Dari lima yang berminat, ada investor lokal juga. Tetapi dari Brazil yang kami harapkan, sementara Australia permohonannya baru masuk" jelas Mentan.

Dengan adanya 1 calon investor asal Brazil yang menunjukkan keseriusan, Mentan berharap investasi tersebut bisa benar-benar terealisasi agar menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Pulau Buru dan sekitarnya. Selain itu, investasi ini dapat meningkatkan populasi sapi di Indonesia sehingga menekan impor sapi dan mencukupi kebutuhan daging sapi nasional.

Pada tahun 2015, kebutuhan daging sapi sendiri diproyeksikan mencapai 640.000 ton, atau ada kenaikan sebesar delapan persen jika dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun 2014 lalu. Selama ini, kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia mayoritas dipenuhi dari sapi impor asal Australia.

Pada kuartal pertama tahun 2015, Pemerintah memberikan kuota impor sapi bakalan sebanyak 100.000 ekor, dengan realisasi pada awal April 2015 lalu mencapai 97.747 ekor. Sementara untuk semester kedua 2015, Kemendag memberikan kuota mencapai 250.000 ekor sapi bakalan, dengan pertimbangan kebutuhan akan daging sapi meningkat dengan datangnya bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.



Presiden Tetapkan HPP Jagung Mentan Siap Laksanakan

Didampingi oleh Menteri Pertanian, Presiden RI melakukan panen raya jagung di Desa Kampasimeci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Panen raya tersebut memberikan harapan bagi Pemerintah dan masyarakat petani jagung di Kabupaten Dompu akan tercapainya swasembada jagung yang telah dicanangkan.

Pada daerah Dompu, luas lahan jagung yang menjadi lokasi panen seluas 890 ha dari lahan jagung secara keseluruhan di Dompu seluas 40 ribu ha. Produksi rata-rata yang diperoleh petani saat sekarang sebesar 8,2 ton per ha untuk pipilan kering kadar air 17% dan kadar air 20% ke atas sebesar 9,5 ton per ha. Pemerintah berharap Kabupaten Dompu dapat menjadi salah satu daerah sentra produksi jagung nasional.

Di hadapan ratusan petani, Presiden mengaku kedatangannya ke Dompu tujuannya selain melakukan panen raya jagung juga karena mendengar harga komoditas tersebut turun. Dimana berdasarkan informasi dari petani bahwa harga jagung pipilan basah yang baru dipanen Rp 1.800/kg dan pipilan kering Rp 2.400/kg. Untuk itu Presiden memutuskan menaikkan harga jagung petani yaitu untuk pipilan basah menjadi Rp 2.000 per kg dan pipilan kering menjadi 2.700 per kg.

"Saya ke sini karena mendengar harga jagung turun, untuk itu saya akan membantu permasalahan petani. Saya akan menaikkan harga jagung di tingkat petani. Kenaikan harga jagung ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan petani. Saya juga meminta kepada Bulog untuk melakukan penyerapan

"Presiden menetapkan HPP di Dompu sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) untuk jagung basah pipilan dan Rp2.700 per kg untuk jagung pipilan kering, Mentan akan segera melaksanakan arahan Presiden tersebut dengan berkoordinasi dengan Bulog, DPR, dan DPD terkait harga jagung di Dompu, untuk menetapkan menjadi HPP jagung secara nasional"

jagung produksi petani setelah diberlakukan HPP jagung" kata Presiden Joko Widodo usai panen raya jagung di Dompu-NTB (11/4).

Menanggapi keputusan Presiden tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan akan segera melaksanakan arahan Presiden terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung. Dirinya akan segera berkoordinasi dengan Bulog, DPR, dan DPD terkait harga jagung di Dompu. Kemudian hasil penetapan di Dompu akan dibawa ke Jakarta untuk ditetapkan menjadi HPP jagung secara nasional.

"HPP di Dompu sudah ditetapkan oleh Presiden sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) untuk jagung basah pipilan atau baru panen dan Rp2.700 per kg untuk jagung pipilan kering. Mulai saat ini para petani jagung sudah tidak perlu khawatir lagi, karena solusinya sudah diputuskan hanya dalam waktu lima menit saja oleh Presiden langsung di lapangan. Tidak perlu menunggu lama-lama,"kata Mentan.

Menurut Mentan, penetapan HPP jagung tersebut, merupakan bukti keseriusan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan yang telah dicanangkan. Untuk saat sekarang, pihak Kementerian Pertanian telah mengalokasikan komoditas jagung di Dompu (NTB), Jenepono (Sulawesi Selatan), dan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Rencananya,

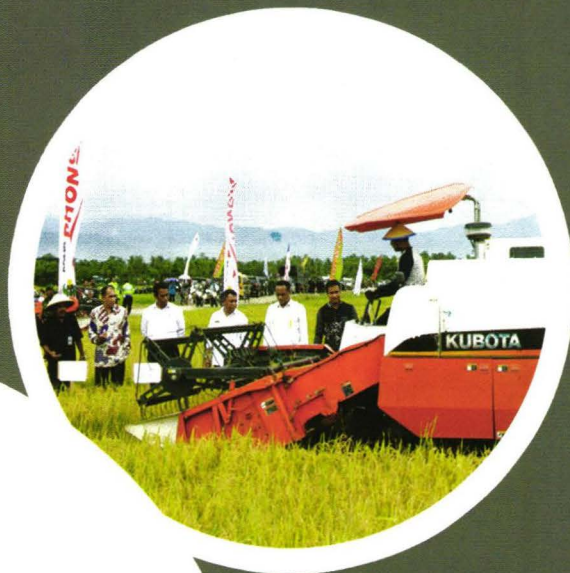
provinsi Lampung akan menjadi sasaran berikutnya untuk komoditas jagung.

Selain penetapan harga jagung, Mentan menjelaskan bahwa pihak Kementan pun siap membantu pertanian di NTB. Diantaranya adalah perbaikan irigasi, pengalokasian benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan). Khusus untuk Dompu, pemerintah akan menggelontorkan 20.000 hektar plus benih dan pupuk gratis. Sementara untuk seluruh Indonesia, tercatat bantuan jagung disiapkan sebesar 1 juta hektar dengan benih dan pupuk yang juga gratis diperoleh petani.

"Pemerintah pusat melalui Kementan siap membantu pertanian NTB umumnya, dan Dompu khususnya baik itu bantuan irigasi, benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan). Khusus untuk jagung, kita akan beri bantuan jagung seluas 1 juta hektar seluruhnya, ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Dan khusus untuk Dompu bantuan yang diberikan seluas 20 ribu hektar," jelas Mentan.

Selain masalah harga jagung, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang dinilai terlalu mahal. Mentan mengaku kaget dengan harga pupuk di Dompu dimana kenaikan harga bisa mencapai 60 persen dari Rp 90 ribu per karung menjadi Rp140 ribu per karung. Untuk mengatasinya Mentan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar segera menindak tegas oknum distributor tersebut.

"Saya minta agar oknum distributor pupuk tidak perlu diingatkan, langsung segera diputuskan saja, tanpa menunggu bukti otentik, apabila ada laporan dari petani langsung tindak tegas oknum distributor tersebut. Karena ulah mereka tersebut dapat berakibat para petani yang sengsara, dan akhirnya semua rakyat ikut sengsara" himbau Mentan.





Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO UMUM DAN HUMAS
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax: (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id